



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ✓ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ✓ | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Entitas :

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|------------|----------|------|------|----------------|----------------|------|----------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| Provinsi | Palu | ✓ Donggala | Tolitoli | Buol | Sigi | Morowali Utara | Parigi Moutong | Poso | Morowali | Tojo Una-una | Banggai | Banggai Kepulauan | Banggai Laut |
|----------|------|------------|----------|------|------|----------------|----------------|------|----------|--------------|---------|-------------------|--------------|

Seselesaikan Temuan BPK di Donggala

D O N G G A L A ,
MERCUSUAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala menyarankan kepada bupati untuk segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tengah terkait administrasi penggunaan APBD.

Ketua DPRD Donggala Mohammad Yasin mengemukakan di Donggala, Selasa (11/7) siang, lembaga yang dipimpinnya memberikan beberapa poin penting rekomendasi atas pembahasan temuan BPK Perwakilan Sulteng.

"Pansus telah selesai membahas temuan BPK-RI Perwakilan Sulteng yang disampaikan kepada kami. Karena itu kami memberikan rekomendasi kepada Bupati Donggala Kasman Lassa untuk menyelesaikan problem tersebut," kata Mohammad Yasin saat menjawab pertanyaan Antara mengenai sikap DPRD atas temuan BPK.

Menurut Yasin temuan BPK mengenai

Ada temuan yang sifatnya administrasi yaitu tidak ada korupsi dan sebagainya atau tidak ada kerugian daerah dan negara. Hanya saja administrasinya belum lengkap.

MOHAMMAD YASIN
Ketua DPRD Donggala

Baca **TEMUAN** di Hal. 7

TEMUAN dari hal 1

administrasi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu dilengkapi atau pembuktian.

"Ada temuan yang sifatnya administrasi, yaitu tidak ada korupsi dan sebagainya atau tidak ada kerugian daerah dan negara. Hanya saja administrasinya belum lengkap," ujarnya.

Terdapat pula, sebut dia, temuan kelebihan pembayaran atas belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala yang perlu diselesaikan.

Karena itu Bupati Donggala Kasman Lassa selaku kepala daerah dan penanggung jawab, harus mengambil sikap tegas terhadap temuan BPK tersebut.

"Temuan dikarenakan minimnya ketersediaan pembuktian administrasi, perlu dilindaki dengan kelengkapan pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan DPRD telah selesai melakukan pembahasan temuan BPK pada pekan kemarin, yang disampaikan langsung oleh pansus lewat rapat paripurna.

PALING BERMASALAH Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Bayu Sabartha mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan LKPD sembilan entitas atau daerah ditemukan Rp 24,49 miliar yang harus dikembalikan ke kas daerah. Dari jumlah itu, 77,27 persen atau Rp 18,93 miliar bertindikasi kerugian negara.

Waktu itu, Bayu pun merinci hasil temuan BPK. Di Palu ditemukan Rp 3,60 miliar dan Rp 1 miliar sudah dikembalikan. Sementara yang terbanyak di Donggala Rp 5,56 miliar, Parimo Rp 4,92 miliar, Poso Rp 970 juta, Touna Rp 3,6 miliar (sudah dikembalikan seluruhnya), Kabupaten Banggai Rp 1,7 miliar, Banggai Laut Rp 1,06 miliar, Morowali Rp 1,01 miliar dan Tolitoli Rp 1,6 miliar.

Menurut Bayu, temuan BPK di Donggala antara lain volume kelebihan pembayaran sebesar Rp 4,9 miliar, temuan jasa konsultan yang masuk kategori kelebihan pembayaran Rp 250 juta.

Kemudian ada pula temuan pengadaan sebesar Rp 364 juta. Ada pula gaji dan tunjangan serta insentif Rp 674 juta. Secara keseluruhan belanja modal Pemda Donggala yang bermasalah mencapai Rp 6 miliar.

Dari jumlah tersebut, saat itu baru dikembalikan ke kas daerah sekitar Rp 1 miliar. ANT/MAN